

RINGKASAN

Faisol, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014 PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H., Faizin Sulistio S.H., LLM

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang bersifat serius dan global, dapat dikatakan perdagangan orang perbukuan dizaman modern. Pelaku perdagangan orang tidak hanya terbatas pada perseorangan melinkan korporasipun baik yang berbadan hukum ataupun tidak juga ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain, dan Apa urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta menggunakan teknis analisis bahan hukum *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode diatas, Penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pola pertanggungjawaban pidana korporasi bersifat kumulatif dan alternatif. Selanjutnya yang menjadi urgensi dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang adalah meberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan dewi terwujudnya tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

SUMMARY

Human trafficking is a serious problem that is global and it could be said as kind of modern era of slavery. Perpetrators of human trafficking are not just limited to individuals but also done by corporations, whether it is incorporated or not. Therefore, next development about corporations set up as a legal entity that can be criminally liable. Based on this background, then I propose some issues to be examined in this study, namely How to set up corporate criminal responsibility in the crime of human trafficking and other offenses, and What is the urgency of setting corporate criminal liability related to the crime of trafficking in persons.

This thesis will use the research method of Juridical Normative approach method with statute approach and case approach, and will use primary, secondary and tertiary law materials as well as content analysis

Based on the research result with the methods above, the researcher finds an answer to the problem, that a corporation can be held criminally liable when criminal acts are performed that meet the criteria by the law and the liability pattern are cumulative and alternative. Furthermore, the urgency of the arrangement of criminal accountability of corporations related to the criminal act of human trafficking is to provide legal protection for victims and the criminal act of human trafficking and for the realization of the purpose of the law which include fairness, certainty, and expediency.